

Strategi Penguatan Jiwa Nasionalisme: Implementasi Pendidikan Multikultural melalui Pendekatan Sejarah Budaya NKRI-RDTL

Strategy for Strengthening the Spirit of Nationalism: Implementation of Multicultural Education through the NKRI-RDTL Cultural History Approach

Roro Wilis^{(1)*}

¹⁾ Program Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta– Jalan Colombo No. 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

*Email: rorowilis.2024@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kurangnya pengajaran sejarah dalam lembaga pendidikan formal yang membahas secara mendalam mengenai hubungan antara NKRI dan Republik Demokratik Timor Leste sehingga menimbulkan pelbagai konflik SARA. Berdasarkan problematika tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menemukan keterkaitan antara NKRI dan Republik Demokratik Timor Leste dalam perspektif historis serta menganalisis upaya untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural melalui pendekatan sejarah budaya sebagai salah satu cara memperkuat jiwa nasionalisme generasi muda. Untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam, maka peneliti melibatkan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan teknik pengumpulan data kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerabatan antara masyarakat Nusa Tenggara Timur, NKRI dan Republik Demokratik Timor Leste didasarkan atas persamaan nenek moyang. Hanya saja, konsekuensi dari eksodus besar-besaran masyarakat Timor Timur yang pro-integrasi NKRI tahun 1999 tersebut telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperkuat jiwa nasionalisme melalui implementasi pendidikan multikultural melalui pendekatan sejarah budaya antara masyarakat NKRI-RDTL.

Kata Kunci : *Nasionalisme ; Pendidikan Multikultural; Sejarah Budaya*

ABSTRACT

This research starts from the lack of history teaching in formal educational institutions that deeply discusses the relationship between the Republic of Indonesia (NKRI) and the Democratic Republic of Timor-Leste, which has led to various ethnic and religious conflicts. Based on this issue, the objective of this research is to find the historical connection between NKRI and the Democratic Republic of Timor-Leste and analyze efforts to implement multicultural education through a cultural history approach as a way to strengthen the nationalism spirit of the younger generation. To obtain in-depth analysis results, the researcher uses a qualitative method with a historical approach and literature review data collection technique. The research findings show that the kinship between the people of East Nusa Tenggara, NKRI, and the Democratic Republic of Timor-Leste is based on common ancestors. However, the consequence of the large-scale exodus of the pro-integration East Timorese people to NKRI in 1999 has led to various social problems. Therefore, efforts are needed to strengthen the spirit of nationalism through the implementation of multicultural education using a cultural history approach between the people of NKRI and the Democratic Republic of Timor-Leste.

Keywords: *Nationalism; Multicultural Education; Culture History*

Submitted : 23 November 2024

Accepted : 08 Januari 2025

Published : 13 Januari 2025

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berbentuk kepulauan (archipelago) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik darat maupun laut (Bahzar, 2014). Dalam mempertahankan kedaulatan negara, peranan wilayah perbatasan turut menentukan

yurisdiksi keberadaan suatu negara terkait. Walaupun demikian, berbagai bentuk kesenjangan justru lumrah ditemui di berbagai wilayah perbatasan Indonesia. Salah satunya, empat kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Kupang, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka menjadi wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (Julqurniati & Susanty, 2019). Keterbatasan fasilitas pendidikan memiliki keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang masih cenderung rendah; aksesibilitas, infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas penduduk masih minim; serta tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat NKRI-RDTL juga masih cenderung rendah telah diupayakan sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 (Muslim, Muklis, Romus, Malau, & Rachmadi, 2023). Namun demikian, permasalahan yang ada di wilayah perbatasan tidak cukup dilihat dalam berbagai bentuk disparitas secara praktis dialami masyarakat NKRI-RDTL, melainkan juga harus melibatkan dimensi sosial yang dipicu oleh trauma jajak pendapat tahun 1999 (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, 2024).

Lepasnya Provinsi Timor-Timur sebagai sebuah keputusan dari hasil jajak pendapat yang pernah dilakukan tanggal 30 Agustus 1999 menyebabkan eksodus atau pengungsian besar-besaran masyarakat Timor-Timur yang pro-integrasi ke beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil registrasi pengungsi Timor-Timur di Indonesia tahun 2001 sebanyak 281,4 ribu jiwa yang mengungsi ke empat belas wilayah kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Kabupaten Belu mendapatkan sebaran jumlah pengungsi tertinggi sebesar 61,4% (Maing & Jatmika, 2021).

Tabel 1. Jumlah Pengungsi Eks-Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2001

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah KK	Jumlah Jiwa			
			L	P	Total	%
1.	Kota Kupang	3.497	8.819	7.850	16.669	5,87
2.	Kupang	7.630	29.410	25.246	54.656	19,23
3.	Timor Tengah Selatan (TTS)	1.177	3.041	2.828	5.859	2,06
4.	Timor Tengah Utara (TTU)	5.620	11.975	11.149	23.124	8,13
5.	Belu		90.687	83.841	174.528	61,42
6.	Manggarai	203	475	401	876	0,35
7.	Ngada	273	392	324	716	0,25
8.	Ende	474	895	819	1.714	0,60
9.	Sikka	325	745	626	1.371	0,48
10.	Flores Timur	199	381	325	706	0,24
11.	Lembata	143	301	259	560	0,19
12.	Alor	849	1.520	1.492	3.012	1,06
13.	Sumba Barat	39	88	75	163	0,05
14.	Sumba Timur	48	113	81	194	0,07
TOTAL			148.842	135.306		

Sumber: Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2001

Hasil dari jajak pendapat diperoleh sebanyak 21,5% atau 94.388 orang yang memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia; sementara 78,5% sisanya memilih merdeka menjadi warga negara Timor Timur. Dengan didukung United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional; pengungsi Timor Timur yang telah pro-kemerdekaan secara teratur dikembalikan ke Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sebagai bagian dari masyarakat negara yang baru berdiri tanggal 20 Mei 2002 tersebut.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Damaledo menyatakan bahwa terjadi perkembangan identitas pengungsi eks-Timor Timur dari “pengungsi” menjadi “eks-pengungsi” kemudian “warga baru”. Dinamika tersebut dapat dilihat dalam perspektif historis ketika United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) mendeklarasikan “Cessation of Status” atau penghapusan status pengungsi bagi warga negara baru Indonesia tanggal 22 Desember 2002; sekaligus diperkuat dengan pemberhentian kebijakan repatriasi bagi pengungsi Timor Timur, walaupun proses pemberlakuannya masih tetap dijalankan sampai tahun 2013. Berdasarkan kedua kebijakan tersebut, maka United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) tidak lagi mencatat adanya status pengungsi sejak tahun 2003. Dengan demikian, warga eks-pengungsi Timor Timur telah resmi menjadi warga negara Indonesia yang baru.

Salah satu ekspektasi eks-pengungsi Timor Timur menjadi warga negara Indonesia dilandasi dari berbagai pembangunan yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru (Lapian & Chaniago, 1988). Akan tetapi realitanya, keputusan untuk menjadi “warga baru” Indonesia tentu berimplikasi pada berbagai hal, salah satunya permasalahan tempat tinggal. Hanya sebagian kecil dari “warga baru” tersebut yang mampu membeli atau menyewa lahan sendiri untuk membangun tempat tinggal; sementara sebagian besar lain terpaksa mengikuti program transmigrasi serta menempati pemukiman di atas lahan pemerintah. Terlepas dari lancarnya program pemukiman kembali (resettlement) oleh pemerintah, berbagai problem interaksi sosial antara pengungsi dengan penduduk lokal masih menjadi proses integrasi lokal yang terjadi hingga detik ini.

Pendidikan multikultural merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisasi konflik yang bersinggungan dengan unsur SARA ataupun perbedaan kelas sosial-ekonomi. Menurut Tobroni, dkk mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai ruang kesempatan pada seluruh peserta didik tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, budaya dan agama; sementara Ambarudin (2016) mengartikulasikan sebagai proses yang membiasakan peserta didik pada berbagai bentuk perbedaan. Terlepas dari beragam definisi tersebut, maka dapat diambil sebuah kesimpulan jika orientasi pendidikan multikultural adalah menciptakan generasi muda yang memahami dan menerima perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi heterogenitas tingkah laku, pola pikir dan latar beragam sebagai suatu keniscayaan. Secara konkret, salah satu bentuk dari pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran di sekolah, salah satunya sejarah.

Pada hakikatnya, tujuan pengajaran sejarah tidak saja memberikan pemahaman kognitif agar peserta didik menjadi cerdas melainkan juga memiliki fungsi didaktis sebagaimana dinyatakan oleh Sartono Kartodirjo agar peserta didik dapat mengambil hikmah masa lampau dari pengalaman nenek moyangnya (Supardi, 2014). Namun sayangnya, kajian sejarah mengenai Timor-Timur yang pernah menjadi bagian dari Indonesia dalam buku teks belum diajarkan secara komprehensif dan mendalam. Berdasarkan hasil telaah dalam buku siswa "Sejarah Indonesia" yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; sejarah mengenai Timor-Timur hanya disebutkan dalam materi "Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)" tepatnya Integrasi Timor Timur dalam Kurikulum 2013. Walaupun pada Kurikulum Merdeka, guru sejarah dapat secara bebas mengorelasikan materi Indonesia pada Masa Orde Baru, baik sejarah internasional ataupun sejarah lokal; penelitian yang membahas mengenai pembelajaran sejarah lokal yang membahas keterkaitan antara warga Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur masih minim. Padahal, penjabaran sejarah budaya mengenai wilayah perbatasan NKRI-RDTL dapat menjadi salah satu representasi konkret dari pendidikan multikultural yang kemungkinan dapat memperkuat rasa nasionalisme peserta didik sebagai generasi muda.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada strategi penguatan nasionalisme yang dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan berbasis multikultural menggunakan pendekatan sejarah budaya; untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian berjudul "Pendekatan Kesejahteraan sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme Masyarakat di Kawasan Perbatasan" yang dilakukan oleh Makarius Erwin Bria dan Suharno menyatakan bahwa rendahnya pengembangan potensi wilayah perbatasan menjadi faktor determinan degradasi nasionalisme masyarakat. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Viktor Banao, Apolonaris Gai dan F. B Tokan berjudul "Anatomi Konflik Sosial Warga Lokal dan Eks Pengungsi Timor Timur" justru mengungkap beberapa sumber konflik dan resolusinya untuk menganalisis hubungan warga lokal dan eks-pengungsi Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, meliputi rekonstruksi arah kebijakan dari top-down menjadi bottom-up terkait pemberian hak atas tanah terhadap warga eks-pengungsi untuk meredam permasalahan ketimpangan akses tanah sebagai basis produksi; serta mengusut tuntas konflik antara warga lokal Kupang dan warga baru eks pengungsi untuk meminimalisasi stereotipe atau labelling "pengungsi" dan prasangka sosial. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh Soehadha berjudul "Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur" yang berupaya menganalisis kehidupan eks-pengungsi Timor Timur di Belu serta interaksinya dengan penduduk lokal.

2. METODE

Untuk menganalisis pentingnya pendidikan multikultural sebagai salah satu strategi memperkuat jiwa nasionalisme, maka peneliti melibatkan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci

sementara teknik pengumpulan data divalidasi dengan menggunakan triangulasi, dianalisis secara induktif dan kesimpulan hasil penelitian harus menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Sementara muatan pendidikan multikultural yang akan diteliti menggunakan pendekatan sejarah budaya mengenai kekerabatan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NKRI) dan Republik Demokratik Timur Leste. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan kredibel, maka peneliti juga melibatkan pendekatan sejarah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kajian literatur, seperti artikel jurnal dan buku induk yang relevan. Sementara analisis dilakukan dengan menggunakan konsep nasionalisme dan pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh James Banks.

3. HASIL

3.1 Kekerabatan Warga Lokal Nusa Tenggara Timur dan Warga Baru eks-Pengungsi Timor Timur dalam Perspektif Sejarah

Sebelum daerah Solor dan Timor dinyatakan sebagai bagian dari Estado da India atau wilayah kekuasaan Kerajaan Portugal di Kawasan Asia dengan Goa sebagai ibukotanya tahun 1681, sempat terjadi persaingan kekuasaan antara penguasa pribumi, Portugis dan Belanda. Hal ini ditunjukkan dari sejarah benteng Solor yang telah berkali-kali berpindah tangan antara Portugis ke Belanda; kemudian sebaliknya. Melalui perjanjian perdamaian yang ditandatangani tahun 1662, maka terjadi polarisasi dua kekuatan besar antara Portugis (Dominikan dan Tupas) yang berpusat di Larantuka dan Belanda (VOC) yang berkedudukan di Kupang dengan ditandai berdirinya benteng mereka tahun 1656. Walaupun berdasarkan dimensi antropologi warga lokal asli Nusa Tenggara Timur dengan warga baru eks-pengungsi Timor-Timur memiliki nenek moyang yang sama; demikian pula secara geografis memiliki batas wilayah yang berdekatan, maka apabila ditelisik berdasarkan perspektif Otto Bauer tentang nasionalisme, maka tumpuan dari konflik horizontal terjadi sejak masa kolonialisme, dimana pengalaman menjadi negara yang “terjajah” antara Indonesia dengan Belanda dan Timor-Timur dengan Portugis tentu akan berbeda.

Insiden tahun 1974 yang disebut dengan Revolusi Bunga atau kudeta militer yang terjadi di Lisbon, ibu kota Portugis memberikan pengaruh nyata terhadap perkembangan baru di Timor-Timur. Pemerintah Portugal memberikan kebebasan kepada rakyat Timor untuk memilih kebebasannya menggunakan jalur referendum. Sebagian besar penelitian historis mengungkap adanya tujuan terselubung pemerintah Orde Baru untuk memperluas wilayah teritorialnya; hanya saja sikap Indonesia yang cukup berhaati-hati meyakinkan PBB bahwa tidak bermaksud melakukan penjajahan atau aneksasi. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional tanggal 8 Oktober 1974, antara lain: a) tidak memiliki ambisi teritorial; b) menghargai kebebasan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri; serta c) memberikan opsi apabila bergabung dengan Indonesia hanya akan dijadikan sebagai provinsi, bukan negara (Sulpina, 2023). Dengan pelbagai iming-iming tersebut, sebagian besar partai Timor Timur seperti UDT,

Apodeti, KOTA dan Tralabista tertarik untuk bergabung pada Republik Indonesia. Dengan berbagai intrik politik dengan pemerintahan Orde Baru, Timor Timur secara resmi masuk dalam wilayah teritorial Indonesia sebagai provinsi ke-27 pada tanggal 17 Juli 1976 (Lapian & Chaniago, 1988).

Ketika terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejarah seakan hanya mengilustrasikan integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai bentuk penjajahan. Padahal, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai pembangunan untuk memajukan provinsi ke-27 tersebut secara bertahap (Sulpina, 2023). Pertama, tahap rehabilitasi sarana-prasarana dan fasilitas umum, seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, telekomunikasi dan perhubungan. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melakukan peningkatan keterampilan pada para pegawai sehingga dapat lebih memahami sistem administrasi pemerintah yang berlaku. Kedua, tahap konsolidasi yang berlangsung pada April 1977 sampai Maret 1978, dimana orientasinya untuk melanjutkan pembangunan sebelumnya atau dapat dikatakan meratakan penataan dan perbaikan secara meluas, seperti pemantapan aparat pemerintah, peningkatan pengembangan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, tahap stabilisasi yang berlangsung pada April 1978 sampai Maret 1982, dimana orientasinya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah secara menyeluruh dan terpadu (Lapian & Chaniago, 1988). Lebih dari itu, Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-IV pemerintah Orde Baru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan wilayah Timor Timur, dimana terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Terlepas dari dimensi politik yang mengitari nasib masyarakat Timor-Timur, kedekatan emosional dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur semestinya menjadi hal yang lumrah terjadi. Walaupun terjadi beragam konflik, hasil dari jajak pendapat dimana 94.388 suara (21,5%) yang tetap memilih menjadi warga negara Indonesia semestinya sulit dianggap sebagai warga baru. Berdasarkan periode waktunya, jajak pendapat dilakukan pada tahun 1999 atau sebelum Timor Timur mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya tanggal 20 Mei 2002 (Maing & Jatmika, 2021). Walaupun demikian proses integrasi lokal dengan berbagai penyesuaian masih tetap terjadi hingga saat ini; yang ditandai dengan berbagai macam konflik horizontal.

3.2 Pendidikan Multikultural dengan Pendekatan Sejarah Budaya sebagai Strategi Penguatan Nasionalisme

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa warga asli Nusa Tenggara Timur dan pengungsi eks-Timor Timur sejatinya memiliki keterkaitan kekerabatan yang erat, terlebih hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keduanya berasal dari nenek moyang yang sama; dan kembali terintegrasi pada masa pemerintahan Orde Baru walaupun masih dengan stigma “penjajah dan terjajah”. Hanya saja, berdasarkan pembagian wilayah jajahan antara Portugis dan Belanda mendorong wilayah Nusa Tenggara Timur (NKRI) dan Timor Timur (RDTL) akhirnya tidak menjadi satu kesatuan melainkan terpecah dengan dipisahkan batas teritorial.

Namun demikian, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Otto Bauer bahwa perbedaan pihak yang menjajah turut mempengaruhi orientasi nasionalisme yang memberikan kriteria bahwa masyarakat lain sebagai saudara sebangsa timbul karena adanya perasaan senasib (Irhandayaningsih, 2012). Oleh sebab itu, permasalahan sosial mengenai stereotipe atau labelling warga baru sebagai eks-pengungsi Timor-Timur masih marak terjadi.

Pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi konflik horizontal yang terjadi antara warga asli Nusa Tenggara Timur dan warga baru eks-pengungsi Timor Timur di masa mendatang. Berdasarkan perspektif James Banks, pendidikan multikultural sebagai sebuah perlakuan (treatment) ataupun muatan dimana peserta didik diposisikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa harus memperhatikan perbedaan mengenai unsur SARA ataupun latar belakang sosial-ekonomi yang melekat dalam dirinya (Purwasari, Waston, & Maksum, 2023). Walaupun perspektif masyarakat secara kolektif dalam memandang warga baru eks-pengungsi Timor-Timur tentu memiliki andil pada keberlanjutan konflik horizontal tersebut, setidaknya pendidikan multikultural yang berbasis sejarah budaya dapat memberikan kemungkinan adanya perubahan orientasi pandangan peserta didik sebagai generasi muda untuk menganggap perbedaan SARA dan latar belakang sosial-ekonomi sebagai hal lumrah. Terlebih, pendidikan multikultural dengan menekankan isu kontekstual di lingkungan sekitar peserta didik didukung oleh orientasi Kurikulum Merdeka (Suhartoyo, et al., 2020). Hal ini mendorong timbulnya kemampuan berpikir kritis untuk tidak menganggap kebenaran sejarah sebagai suatu yang tunggal; sekaligus meningkatkan jiwa toleransi.

Berdasarkan pemahaman James Banks, beberapa dimensi yang penting untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan yang berbasis multikultural, antara lain:

3.2.1 Integrasi Nilai Multikultural dalam Kurikulum (Content Integration)

Kreativitas pendidik untuk memperkaya muatan pembelajaran dengan melibatkan unsur-unsur budaya baik dalam materi, metode, tugas ataupun latihan maupun evaluasi pembelajaran (Purwasari, Waston, & Maksum, 2023). Fokus dalam pembelajaran sejarah, guru dapat menginternalisasikan materi mengenai akar sejarah kawasan perbatasan NKRI-RDTL secara komprehensif, mulai dari nenek moyang, proses integrasi Timor-Timur di Indonesia sampai kontekstualisasi kehidupan masyarakat wilayah perbatasan saat ini. Dengan demikian, guru telah mendorong peserta didik untuk menciptakan asumsi adanya persamaan budaya antara wilayah Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur sejatinya bersumber dari nenek moyang yang sama (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, 2024).

3.2.2 Rekonstruksi Pengetahuan (The Knowledge Konstruktion Process)

Peserta didik dibiasakan untuk senantiasa berpikir kritis dengan berbagai perspektif sebagai salah satu langkah konkret dalam menginternalisasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Fokus pada kasus konflik horizontal yang terjadi antara warga lokal asli Nusa Tenggara Timur dan warga baru Timor-Timur, sejarah hanya

mengungkap bahwa Indonesia pernah menjajah Timor Leste; walaupun fakta-fakta mengenai pembangunan yang pernah dilakukan pada pemerintah Orde Baru juga secara bersamaan ditemukan dalam berbagai hasil penelitian (Lapian & Chaniago, 1988). Dalam hal ini, guru dapat merekonstruksi pengetahuan peserta didik dengan tidak hanya percaya pada satu peristiwa sejarah saja atau monokausal, melainkan juga memberikan pemahaman bahwa sejarawan memiliki keterbatasan pengetahuan dan kepentingan tertentu yang berpengaruh terhadap kisah sejarah (Alfian, 2017). Dengan demikian, peserta didik tidak akan mudah terjebak pada satu sudut pandang, melainkan mempertimbangkan pelbagai sudut pandang lain sehingga lebih arif dalam menghadapi perbedaan.

3.2.3 Pedagogi Kesetaraan (A Equity Pedagogy)

Untuk menciptakan pendidikan multikultural, maka guru harus memiliki kepekaan dan kemampuan melihat situasi tentang bagaimana proses pembelajaran berjalan. Salah satu orientasi dari pendidikan multikultural adalah mencegah perbedaan ekonomi dan sosial menjadi penghambat dalam pembelajaran (Purwasari, Waston, & Maksum, 2023). Hal ini karena pendidikan sejatinya tidak saja ditekankan untuk membekali peserta didik agar cerdas secara intelektual, melainkan juga bersikap kritis untuk mempertanyakan asumsi, paradigma dan pandangan kolektif yang tidak lagi relevan tetapi masih mapan di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru misalnya menginstruksikan peserta didik berdiskusi dalam kelas untuk saling mengkritisi pandangan ataupun paradigma yang acapkali didengar di masyarakat dengan tidak hanya beracuan pada satu perspektif saja.

3.2.4 Pengurangan Prasangka (Prejudice Reduction)

Sebagian besar perspektif yang dilandasi stereotipe dan prasangka cenderung menimbulkan ketidakadilan atau praktik diskriminasi. Demikian pula, relasi sosial antara warga lokal Nusa Tenggara Timur dan pengungsi Timor-Timur yang diwarnai berbagai stereotipe ataupun prasangka sosial karena keterbatasan pengetahuan ataupun kurangnya informasi mengenai akar sejarah keduanya. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Viktor Banao, dkk (2021) berhasil mengungkap perspektif salah satu masyarakat etnik Rote, dimana eks-pengungsi Timor Timur diasumsikan memiliki sifat yang tidak baik dimana suka mencuri sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula pengakuan dari salah satu tokoh masyarakat Desa Tanah Merah yang beranggapan bahwa kehadiran warga Timor Timur memicu rasa ketidaknyamanan warga lokal. Senada dengan tripusat pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hadjar Dewantara, dimana masyarakat merupakan wadah pengajaran bagi generasi muda; sehingga perspektif kolektif masyarakat memiliki pengaruh cukup vital bagi keberlanjutan konflik horizontal tersebut.

Demi mengurangi prasangka, maka guru harus memiliki pengetahuan terkait akar budaya kedua etnis tersebut. Maka, guru akan dengan mudah mengidentifikasi

metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tanpa memandang perbedaan unsur SARA dan latar belakang sosial-ekonomi. Beberapa metode yang cocok untuk menanamkan semangat multikultural adalah bekerja secara berkelompok, baik model problem based learning (PBL), project based learning (PjBL), inquiry learning ataupun discovery learning. Dengan membiasakan belajar bersama secara berkelompok, maka peserta didik akan menganggap berbagai perbedaan sebagai suatu hal yang lumrah di Indonesia.

3.2.5 Pemberdayaan Budaya Sekolah dan Struktur Sosial (An Empowering School Culture and Social Structure)

Selain peran guru dalam proses pembelajaran, budaya sekolah juga memiliki kedudukan untuk memberikan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari negara yang multikultural. Dalam hal ini, budaya sekolah dapat diartikan sebagai tradisi, keyakinan dan norma-norma dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat dan dipelihara melalui pimpinan dan para guru sekolah. Secara konkret, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial yang dimaksud dapat diwujudkan dalam berbagai hal, misalnya pola komunikasi yang dibiasakan seluruh pihak sekolah kepada peserta didik dengan tidak memandang perbedaan SARA ataupun latar belakang sosial-ekonomi; ataupun keikutsertaan peserta didik dalam berbagai kegiatan rutin sekolah, seperti technical meeting olahraga ataupun HUT sekolah.

Berdasarkan lima dimensi yang telah dipaparkan, maka kita dapat melihat bagaimana orientasi pendidikan yang tidak lagi mengarah pada apa yang dipikirkan melainkan cenderung pada mengajari bagaimana peserta didik dapat berpikir. Menurut Banks, keterlibatan aktif dari peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan serta membiasakan diskusi yang melibatkan berbagai interpretasi telah memperlihatkan proses internalisasi pendidikan multikultural tersebut. Lebih lanjut, Banks juga memberikan catatan penting bagi pengajaran sejarah agar peserta didik diberikan ruang untuk menginterpretasikan peristiwa sejarah (interpretations of the history of the past and history in the making) berdasarkan perspektif masing-masing serta bersikap arif menanggapi penafsiran orang lain yang mungkin bertentangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Wilayah perbatasan NKRI-RDTL merupakan salah satu kawasan yang turut menentukan yurisdiksi keberadaan suatu negara. Apabila kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat tidak segera dapat dipenuhi, maka akan secara konsekuen menyebabkan hilangnya rasa loyalitas terhadap negara atau nasionalisme. Lebih dari itu, konflik horizontal yang terjadi antara masyarakat lokal Nusa Tenggara Timur dengan warga baru eks-pengungsi Timor Timur menjadi problematika laten yang belum banyak disoroti dalam berbagai kajian. Dalam hal ini, pendidikan multikultural ditawarkan sebagai sebuah solusi untuk memberikan investasi berupa penanaman nilai multikultural sebagai wujud konkret dari strategi penguatan

nasionalisme dalam diri peserta didik sebagai generasi muda bagian dari masyarakat kawasan perbatasan. Selain bertumpu pada cara guru membiasakan peserta didik terhadap keberagaman, pendekatan sejarah budaya juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta didik untuk tidak menganggap sejarah nasional sebagai kebenaran tunggal, melainkan juga memandang perspektif lain yang mungkin bertentangan sebagai hal yang lumrah. Dengan demikian, konflik horizontal memiliki kemungkinan dapat mereda di masa yang akan datang.

4.2. Saran

Peneliti memandang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih minim untuk memberikan saran ataupun temuan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat, terutama Kawasan perbatasan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, Kawasan perbatasan menjadi garda terdepan yang paling bersinggungan dengan negara lain tetapi memiliki akses yang jauh dengan pemerintah pusat; sehingga keinginan untuk melepaskan diri dari Indonesia masih sangat mungkin terjadi. Untuk itu, diperlukan suatu langkah konkret lanjutan sebagai strategi dalam memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Kawasan perbatasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, S. (2017). Multiperspektif dalam Mata Pelajaran Sejarah: Langkah Nyata Menghargai Kebhinekaan di Ruang Kelas. *SEJARAH DAN BUDAYA*, 11(2), 199-205.
- Amin, M. (2018). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 9(1), 24-34.
- Bahzar, M. (2014). Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan melalui Penguatan Modal Sosial. *Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Negara* (pp. 33-46). Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada.
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global. *Humanika*, 16(9).
- Julqurniati, N., & Susanty, D. (2019). Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL (Studi Kasus di Kabupaten TTU Provinsi NTT). *Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 9(1), 664-675.
- Kebudayaan, K. P. (2019). Penguatan Nasionalisme Peserta Didik di Daerah Perbatasan. Jakarta: Badan Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lapian, A., & Chaniago, J. (1988). Timor Timur dalam Gerak Pembangunan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Direktorat Jenderal Kebudayaan; Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional; Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

- Maing, S., & Jatmika, S. (2021). Dinamika Integrasi Lokal Warga Eks Timor Timur di Wilayah Pemukiman Pengungsi Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Perspective*, 6(1), 38-64.
- Muslim, Muklis, Romus, M., Malau, R., & Rachmadi, M. (2023). Penguatan Nasionalisme melalui Aktivitas Ekonomi di Pulau Terluar Indonesia (Studi di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis-Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 175-184.
- Purwasari, D., Waston, & Maksum, M. (2023). Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pandangan James A Banks. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(2), 249-258.
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. (2024, 11 20). Kajian Triwulan II Pembangunan Pertahanan di Perbatasan Darat RI-RDTL. Retrieved from Kajian RDTL: <https://seskoad.mil.id/admin/file/kajian/05%20Kajian%20RI-RDTL.pdf>
- Suhartoyo, E., Wailissa, S., Jalarwati, S., Samsia, Wati, S., Qomariah, N., Amin, I. (2020). Pembelajaran Kontekstual dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 1(3), 161-164.
- Sulpina, N. (2023). Konflik Indonesia terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999. *Kala Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 11-18.
- Supardi. (2014). Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 91-99.